MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk penambahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2083 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024; dan

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 289 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-250/MK.02/2024 tanggal 18 Maret 2024;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7612/B-BP.02.01/SD/K/2023 tanggal 31 Juli 2023;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

KETIGA : Syarat jabatan bagi jabatan pelaksana untuk klasifikasi teknisi merujuk pada Lampiran III Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

KEEMPAT : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut, dilakukan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Instansi Pemerintah.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 2 Juli 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN CCCLXXIX
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
A	TENAGA KESEHATAN	120	
1.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU
2.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS KESEHATAN | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT | SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI
3.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU | KEUANGAN DAN ASET | PENGENDALI BPJS
4.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS GONENGGATI DONGGALA
5.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU | PENUNJANG MEDIK | REKAM MEDIS
6.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	4	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABELOTA DONGGALA
7.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS KESEHATAN | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT | SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
8.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS GONENGGATI DONGGALA
9.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABELOTA DONGGALA | BIDANG PENUNJANG MEDIS DAN NON MEDIS | SEKSI PENUNJANG MEDIS
10.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU | PENUNJANG MEDIK | APOTEK RUMAH SAKIT
11.	APOTEKER AHLI PERTAMA	4	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU
12.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS TOMADEA | SUB BAGIAN TATA USAHA
13.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU | PENUNJANG MEDIK | GUDANG FARMASI RUMAH SAKIT
14.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABELOTA DONGGALA | BIDANG PENUNJANG MEDIS DAN NON MEDIS | SEKSI PENUNJANG MEDIS
15.	BIDAN AHLI PERTAMA	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABELOTA DONGGALA | BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN | SEKSI KEPERAWATAN
16.	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS KAMI SEIVI
17.	BIDAN TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SIPATOKKONG | SUB BAGIAN TATA USAHA
18.	BIDAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS GONENGGATI DONGGALA
19.	BIDAN TERAMPIL	4	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS TOMADEA | SUB BAGIAN TATA USAHA
20.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU | PENUNJANG MEDIK | INSTALASI RADIOLOGI
21.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS GONENGGATI DONGGALA
22.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS KAMI SEIVI
23.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS MALAMBORA
24.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	2	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU
25.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU | PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN | RUANG PERAWATAN KELAS II DAN III
26.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU | PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN | POLI GIGI

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
27.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU
28.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS KESEHATAN | BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI
29.	FISIOTERAPIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABELOTA DONGGALA | BIDANG PENUNJANG MEDIS DAN NON MEDIS | SEKSI PENUNJANG MEDIS
30.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	6	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU
31.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SIPATOKKONG | SUB BAGIAN TATA USAHA
32.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS GONENGGATI DONGGALA
33.	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS GONENGGATI DONGGALA
34.	PERAWAT AHLI PERTAMA	4	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABELOTA DONGGALA | BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN | SEKSI KEPERAWATAN
35.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU | PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN | INSTALASI BEDAH UMUM
36.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SIPATOKKONG | SUB BAGIAN TATA USAHA
37.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU | PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN | RUANG PERAWATAN KELAS I DAN VIP
38.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU | PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN | RUANG PERAWATAN KELAS II DAN III
39.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU | PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN | RUANG PERAWATAN ICU
40.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU | PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN | RUANG PERAWATAN ANAK
41.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS MALAMBORA
42.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU | PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN | POLI UMUM
43.	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU | PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN | INSTALASI GAWAT DARURAT UMUM
44.	PERAWAT TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SIPATOKKONG | SUB BAGIAN TATA USAHA
45.	PERAWAT TERAMPIL	4	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS GONENGGATI DONGGALA
46.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU | PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN | RUANG PERAWATAN NICU/PICU
47.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU | PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN | RUANG PERAWATAN KELAS II DAN III
48.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU | PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN | INSTALASI BEDAH UMUM
49.	PERAWAT TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS KAMI SEIVI
50.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU | PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN | RUANG PERAWATAN ICU
51.	PERAWAT TERAMPIL	15	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABELOTA DONGGALA | BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN | SEKSI KEPERAWATAN
52.	PERAWAT TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS TOMADEA | SUB BAGIAN TATA USAHA
53.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABELOTA DONGGALA | BIDANG PENUNJANG MEDIS DAN NON MEDIS | SEKSI PENUNJANG MEDIS
54.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU | PENUNJANG MEDIK | REKAM MEDIS
55.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
				MENENGAH
68.	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI	2	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
69.	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
70.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 AGRIBISNIS	6	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
71.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP
72.	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ANALISIS KEUANGAN ; S-1 ADMINISTRASI ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA | ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN ORGANISASI
73.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 EKONOMI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	10	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
74.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	4	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
75.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
76.	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III AKUNTANSI	4	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
77.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
78.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK ELEKTRO	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
79.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI	6	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
80.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	20	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
81.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA | ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN ORGANISASI
82.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
83.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SAINS KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATATAN SIPIL
84.	PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PEMULA	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SLTA/SMA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
85.	SANDIMAN AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 INFORMATIKA ; S-1 MATEMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	5	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		BAHASA INGGRIS ; D-III BAHASA JEPANG ; D-III BAHASA KOREA ; D-III BAHASA MANDARIN ; D-III BAHASA PERANCIS ; D-III GIZI ; D-III KOMUNIKASI MASSA ; D-III KEPARIWISATAAN ; D-III MANAJEMEN ; D-III MANAJEMEN TATA BOGA ; D-III PARIWISATA ; D-III PERHOTELAN ; D-III PERJALANAN WISATA ; D-III TATA HIDANG ; D-III TATA BOGA		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | SUB BAGIAN PROTOKOL
49.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM SYARIAH ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 AKUNTANSI	10	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA | PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
50.	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; D-IV GEOLOGI ; D-IV INSTRUMENTASI KONTROL INDUSTRI ; D-IV JASA KONSTRUKSI ; D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
51.	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL ; S-1 BIOLOGI ; S-1 EKONOMI ; S-1 FISIKA ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU SOSIAL ; S-1 ILMU LINGKUNGAN ; S-1 BUDIDAYA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP
52.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 PARIWISATA ; S-1 KEWIRAUSAHAAN ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 USAHA KOPERASI ; S-1 HUKUM	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS SOSIAL
53.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 PARIWISATA ; S-1 KEWIRAUSAHAAN ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 USAHA KOPERASI ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
54.	PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA | PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM
55.	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 AGROBISNIS ; S-1 AGRONOMI ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 BIOKIMIA ; S-1 BIOLOGI ; S-1 ILMU BIOLOGI ; S-1 KEHUTANAN ; S-1 SOSIOLOGI	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP
56.	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	S-1 AGRIBISNIS ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 HUKUM ; S-1 KEHUTANAN ; S-1 KEWIRAUSAHAAN ; S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
57.	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 AGRIBISNIS ; S-1 AGRIBISNIS HORTIKULTURA ; S-1 AGRIBISNIS PETERNAKAN ; S-1 BUDIDAYA PERTANIAN ; S-1 AGROTEKNOLOGI ; S-1 ILMU EKONOMI PERTANIAN ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PANGAN ; S-1 NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK ; S-1 TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN ; S-1 TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
58.	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 AGRIBISNIS ; S-1 AGRONOMI ; S-1 AGROTEKNOLOGI ; S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN ; S-1 BUDIDAYA PERTANIAN ; S-1 PERKEBUNAN	10	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
59.	PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL	D-III AGRIBISNIS ; D-III AGROEKOTEKNOLOGI ; D-III AGRONOMI ; D-III AGROTEKNOLOGI ; D-III BUDIDAYA PERTANIAN ; D-III PENYULUHAN PERTANIAN ; D-III PERKEBUNAN ; D-III PETERNAKAN ; D-III TANAMAN PANGAN	13	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
60.	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV LAYANAN PUBLIK ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS SOSIAL
61.	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA | BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN
62.	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	4	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA | PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM | SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
63.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA | PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM
64.	PEREKAYASA AHLI PERTAMA	S-2 ILMU INFORMATIKA ; S-2 SISTEM INFORMASI ; S-2 KIMIA TERAPAN ; S-2 STATISTIKA TERAPAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
65.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
66.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 SISTEM INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
67.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
	TERAMPIL	TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS		SIPIL
24.	PEMBINA INDUSTRI AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AGRIBISNIS ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 KEHUTANAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
25.	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI ; S-1 EKONOMI	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
26.	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 ARSITEKTUR	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
27.	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; D-IV JASA KONSTRUKSI ; D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
28.	PENATA KELOLA OBAT DAN MAKANAN	S-1 FARMASI ; S-1 GIZI ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	13	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS KESEHATAN | BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
29.	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 AGRIBISNIS ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMPUTER	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
30.	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	2	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
31.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PERBENDAHARAAN | SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAN GAJI
32.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABELOTA DONGGALA | BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN | SEKSI PELAYANAN MEDIS
33.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABELOTA DONGGALA | BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN | SEKSI KEPERAWATAN
34.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABELOTA DONGGALA | BAGIAN TATA USAHA | SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM
35.	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 SOSIOLOGI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KELUARGA ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT ; S-1 ILMU STATISTIK	2	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
36.	PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN TERAMPIL	D-III ARSITEKTUR ; D-III ELEKTRONIKA INDUSTRI ; D-III DESAIN INTERIOR ; D-III KONSTRUKSI GEDUNG ; D-III KONSTRUKSI SIPIL ; D-III PERTAMANAN	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
37.	PENATA LAKSANA PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP
38.	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
39.	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	7	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
40.	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
41.	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR ; D-IV GEOGRAFI ; D-IV PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KOTA ; D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
42.	PENELITI AHLI PERTAMA	S-2 PERTANIAN BERKELANJUTAN ; S-2 HUKUM ; S-2 PENDIDIKAN DIGITAL ; S-2 HORTIKULTURA	2	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
43.	PENGAMAT TERA PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
44.	PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI PERTAMA	S-1 BUDI DAYA PETERNAKAN ; S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK ; S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK ; S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN ; S-1 INDUSTRI PETERNAKAN ; S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK	5	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
45.	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 GEOGRAFI ; S-1 ILMU GEOGRAFI ; S-1 TEKNIK GEOLOGI ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 TEKNIK KIMIA ; S-1 TEKNIK PERMINYAKAN ; S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN ; S-1 TEKNIK SIPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP
46.	PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI PERTAMA	S-1 BUDI DAYA PETERNAKAN ; S-1 ILMU PETERNAKAN ; S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK ; S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
47.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK SIPIL	16	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | INSPEKTORAT
48.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III BAHASA ARAB ; D-III BAHASA BELANDA ; D-III	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA | ADMINISTRASI UMUM |

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
B	TENAGA TEKNIS		346	
1.	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	S-1 KEWIRAUSAHAAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 PARIWISATA ; S-1 EKONOMI ; D-IV DESTINASI PARIWISATA	8	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS PARIWISATA
2.	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
4.	ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI SUMBER DAYA ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	7	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
5.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 EKONOMI	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA | PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 AGRIBISNIS ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI PERTANIAN ; S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN ; S-1 ILMU GIZI ; S-1 GIZI MASYARAKAT ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN	6	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS KETAHANAN PANGAN
8.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 STATISTIKA	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | BADAN PENDAPATAN DAERAH
9.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 STATISTIKA	4	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
10.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 STATISTIKA	4	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
11.	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
12.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
13.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA | ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN ORGANISASI
14.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 KEARSIPAN ; D-IV KEARSIPAN ; D-IV KEARSIPAN DIGITAL ; D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL	2	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS KEARSIPAN
15.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEARSIPAN ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 KEARSIPAN ; D-IV KEARSIPAN DIGITAL ; S-1 EKONOMI	4	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATATAN SIPIL
16.	ASISTEN PELATIH OLAHRAGA PEMULA	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SLTA/SMA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
17.	ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP PEMULA	SMA IPA ; SMK NAUTIKA PERIKANAN LAUT ; SMK TEKNIK MESIN	2	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS PERIKANAN
18.	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 PERTANIAN ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 STATISTIKA	16	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | INSPEKTORAT
19.	DOKUMENTALIS HUKUM	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III MANAJEMEN	5	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA | PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM | SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
20.	INSTRUKTUR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 KEWIRAUSAHAAN ; S-1 PARIWISATA ; S-1 USAHA KOPERASI ; S-1 PERIKANAN TANGKAP ; S-1 ILMU KELAUTAN ; S-1 BISNIS	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
21.	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV RELASI INDUSTRI ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
22.	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	PROFESI DOKTER HEWAN	11	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
23.	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER ; D-III	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATATAN

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
56.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABELOTA DONGGALA | BIDANG PENUNJANG MEDIS DAN NON MEDIS | SEKSI PENUNJANG MEDIS
57.	PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU | PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN | GEDUNG REHABILITASI NARKOBA
58.	TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABELOTA DONGGALA | BIDANG PENUNJANG MEDIS DAN NON MEDIS | SEKSI PENUNJANG MEDIS
59.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS GONENGGATI DONGGALA
60.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SIPATOKKONG | SUB BAGIAN TATA USAHA
61.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU | PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN | PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT
62.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU
63.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS GONENGGATI DONGGALA
64.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABELOTA DONGGALA | BIDANG PENUNJANG MEDIS DAN NON MEDIS | SEKSI PENUNJANG NON MEDIS
65.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU | PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN | POLI GIGI

parrb